

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Skripsi dan Jurnal

- Ainun. “Alasan Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Telah Sesuai Dengan Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan.” Narotama, 2022.
- Arum, Fitri Atur. “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kedaruratan Negara.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, t.t.
- Arum, Fitri Atur, dan Erika Maya Oktavia. “Implementasi Keadaan Darurat Di Indonesia: Inkonsisten Penerapan Keadaan Darurat.” *El-Wasathiya* 11 (2023).
- Ayuni, Qurrati, Satya Arinanto, Fitra Arsil, dan Maria Farida Indrati. “Concept And Implementation on the State of Emergency in Indonesia: Outlook to Strengthen Checks and Balances during Crisis.” *REVISTA DE INVESTIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS* 9 No 1 (2022): 11–36.
- Bima Guswara, Arrafi, dan Ali Imran Nasution. “Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 dan 54/PUU/XXI/2023.” *Jurnal USM Law Review* 6 No 3 (2023): 1052–72.
- Djati, Daniel Mulia. “Penafsiran Asas Kepastian Hukum Dan Kekosongan Hukum Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Fakultas Hukum*. 5 No.1 (2022): 591.

- Faqih, Muhammad. “Proses Pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” *Mimbar Yustitia* 3 (2019): 175.
- Firdaus, S.H., M.H., Fahmi Ramadhan. “Kajian Konstitusionalitas Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja.” Jember, 2023.
- Fitriani, Elza. “ANALISIS UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PASAL KONTROVERSIAL PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.” Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2023.
- Fudika, Moza Dela, Aryo Akbar, dan Asri Muhammad Saleh. “Tinjauan Yuridis kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Menakar Negara Berada Dalam Hal Ikhwal Kegentingan Memaksa oleh Presiden.” *Jurnal Panorama Hukum* 7 No. 2 (2022): 106–8.
- Gea, Daniel Frichiles Kislew. “Efektivitas Struktur Organisasi PKP-PK Guna Meningkatkan Pelayanan Keadaan Darurat Di Bandar Udara Internasional Kualanamu-Deli Serdang.” Tugas Akhir, Politeknik Penerbangan Palembang, 2025.
- Haq, Muhammad Fakhrol, Kukuh Sudarmanto, Zainal Arifin, Muhammad Junaidi, Albertus Heru Nuswanto, dan Rati Riana. “Eksistensi Perpu No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.” *Jurnal USM Law Review* 8 No.2 (2025): 992–94.
- Hermawan. *Teori Penafsiran Konstitusi Implikasi Pengujian Konstitusi di Mahkamah Konstitusi*. t.t.

Kadek Ayu Sri Undari, Ni, dan Kadek Agus Sudiarawan. “LEGALITAS FORMIL PENERBITAN PERPPU CIPTA KERJA: KAJIAN ATAS SUBJEKTIVITAS PREAIDEN DI TENGAH OVERSIZED COALITION.” *Jurnal Kertha Semaya* 11 No 4 (2023): 714–28.

Konstitusi Teori, Hukum dan Perkembangannya. t.t.

Maha, Muhammad Asri Rajani, dan Arifuddin Muda Harapan. “Analisis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Terkait Ketentuan Waktu Istirahat Bagi Pekerja dan Buruh.” *Journal Homepage* 9 (2023).

Marius, Supremacy Of The Constitution Theoretical And Practical considerations. Challenges Of The Knowledge Society. Public Law. 2023. (377-383) (Hal 382)

Maulana, Muhammad Rian, Dkk. "Penafsiran Q.S. An-Nisa: 58 & 135: Prinsip Keadilan dan Amanah dalam Kehidupan Sosia". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*. 2026. Vol 4 No. 1 (1219-1226).

Maulidia, Al Shintya. “URGENSITAS PERPPU CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.” Universitas Islam Negeri Aluddin, 2023.

Miller, W Bradly, “Constitutional Supremacy And Juducial Reasoning”. *Queens L.J.* (2020): 353-372. 354

Nuh, Muhammad Syarif. “Hakekat Keadaan Darurat Negara (state of emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” *Jurnal Hukum* 2 (2011).

- Pasaribu, Albain. “Urgensi Mendesain Ulang Hukum Negara Dalam Keadaan Darurat.” Kepaniteraan dan Kesetariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2021.
- Permaqi, Farhan. “Politik Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Asas Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa (Kajian Yuridis Normatif Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14 No 4 (2017): 407–20.
- Purnomo, Chrisdianto Eko, Amiruddin, dan Minollah. “Konstruktur Hukum Pemberlakuan Negara Dalam Keadaan Darurat Berdasarkan Kaidah Kegentingan Yang Memaksa.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 8 (2023): 179.
- Rachman, AA Muhammad Insany, Rusfandi, dan Evi Dwi Hastri. “Tinjauan Penetapan Perrpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Panah Keadilan* 2 (2023).
- Rohman, Moh Mujibur, Darurat Dalam Prespketif Fiqh Siyasah”. *Jurnal Hukum Non Diskriminatif (JHND)*:2024. Vol. 2 No. 2. 99-102. 101
- Sahfutra, Mirza. “Negara Dalam Keadaan Darurat Menurut Undang-Undang Dasar 1945.” *Jurnal Transformasi Administrasi* 10 (2020): 88.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, dan A. Hamid S. Attamimi. *Ilmu perundang-undangan: dasar-dasar dan pembentukannya*. Kanisius, 1998.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Soneangka, Laode Muhammad Yusuf. “Tinjauan Hukum Internasional Proporsionalitas Pembatasan Ham Terhadap Kebijakan Pemerintah Memutus Akses Internet Dalam Keadaan Darurat.” Skripsi, Hasanuddin Makasar, 2023.

Sugannda, Atma, dan Musa Anthony Siregar. "The Meaning And Development Of State Emergency Laws Based On Constitution In The Indonesian Legal System." *Atlantis Press* 499 (2020): 554–553.

Sulistiono, Sandy, dan Widyawati Boediningsih. "Pembentukan Perppu Cipta Kerja Dalam Perspektif Negara Hukum Demokrasi." *Aladalah, Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. 1 (2023): 261.

Syahuri, Taufiqurrahman, dan Rianda Dirkareshza. "Pembatasan Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Perpu." *Jurnal Yudisial* 16 No.3 (2023): 407–15.

Syarif Nuh, Muhammad. "Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal Hukum* 18 No 2 (2011): 229–46.

Tim Redaksi Pustaka Baru Press. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Pustaka Baru Press, 2019.

Triadi, Nia Hasna, dan Dr. Arfa'I, S.H., M.H. "Analisis Perpu Sebagai Satu Jenis Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU NO.12 Tahun 2022." *Journal of Constitutional Law*. 2 No 3 (2022): 362–66.

Yitawati, Krista, Meirza Aulia Chairani, dan Angga Pramodya Pradana. "Problematika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan Memberikan Perlindungan Dan Kesejahteraan Pekerja." *Jurnal Rechts* 13 (2024).

Website

Wahyudi, Willa. "Prinsip Negara Hukum Yang Diterapkan Di Indonesia". Hukum Online. (2022). Diakses pada Kamis, 24 Juni 2026 pukul 00.27 WITA.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/?page=2>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009